

ABSTRAK

MUHAMMAD RANGGA HAMZAH. 01012011022. *“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika”* dibimbing Anshar dan Ahmad Mufti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dapat menyimpangi ketentuan Undang-Undang demi tercapainya system peradilan yang bermartabat dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai acuan utama dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni teknik analisis yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode analisa yang dimulai dengan pengetahuan yang di mulai bersifat umum untuk menyimpulkan suatu peristiwa secara umum.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan No. 2856 K/Pid.Sus/2021, yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum pada dalam tindak pidana narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 111 Jo Pasal 144 UU Narkotika adalah berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2015 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pelaksanaan tugas bagi pengadilan .

Dasar Hakim dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara adalah kebebasan yang mandiri dan kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada seorang Hakim dalam mengambil keputusan bertujuan untuk mengali nilai-nilai keadilan dengan pertimbangan yang cukup melahirkan suatu putusan yang adil dan bermartabat, oleh karenanya demi tercapainya tujuan hukum seorang Hakim dapat menyimpangi ketentuan Undang-Undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Abstract

"Judge's Considerations in Imposing Sentences Below the Minimum Threat in Narcotics Crimes" supervised by Anshar and Ahmad Mufti.

This research aims to find out whether the freedom of judges in making decisions can deviate from the provisions of the law in order to achieve a dignified and socially just justice system for all Indonesian people.

The method used in this research is a normative legal research method using secondary data as the main reference in analyzing the data. The author uses a qualitative descriptive analysis technique, namely an analysis technique based on applicable regulations. Furthermore, drawing conclusions is carried out using a deductive method, namely an analysis method that begins with general knowledge to conclude an event in general.

The research results show that the legal status of the minimum criminal provisions for narcotics crimes as stipulated in Article 111 in conjunction with Article 144 of the Narcotics Law is based on Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2015 concerning the 2015 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as the implementation of the duties of the court.

The basis for a Judge in considering a case is independent freedom and the authority given by the State to a Judge in making a decision aims to explore the values of justice with sufficient consideration to produce a just and dignified decision, therefore in order to achieve a person's legal objectives. Judges can deviate from the provisions of the law in order to achieve social justice for all Indonesian people.

Keywords: *Narcotics crimes; criminal decision making; legal imposition*